

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN SEKSUAL**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan, Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**MUH. ARHAM LATIF**

**NIM. 10500113176**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Arham Latif  
Nim : 10500113176  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 01 Januari 1996  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Perum. Hertasning Madani Blok. K No. 3, Gowa  
Judul : “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Agustus 2017  
Penyusun,

Muh. Arham Latif  
NIM : 10500113176

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ **Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)** ”, yang disusun oleh saudara **Muh. Arham Latif**, NIM: **10500113176**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 23 Agustus 2017  
30 Zulqaidah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekertaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.  
Munaqisy I : Dr. Hamsir, M.Hum.  
Munnaqisy II : Drs. H. Munir Salim, M.H.  
Pembimbing I : Dr. Jumadi, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)”, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar Ilahi.

Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penulis serta kedua saudara dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Jumadi, S.H., M.H., dan Bapak Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D., selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada



penulis untuk melakukan penelitian.

7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada sahabat seperjuangan, Nurul Munawwarah Amin, Indra Pratama, Sinar, Nurul Ayu Tri Ulfiah, Sunandar N, Ikhsan Asmar, Samsir, Supriadi Dwi Apriatno dan seluruh penghuni kelas Ilmu Hukum D, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Kepada sahabatku, Andi Tenri Wali, Andi Khaidir, Abdul Muzakkir, Musyahwir Tahir, dan Muh. Hasan, yang telah memberikan dukungan doa dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Keluarga besar Ilmu Hukum Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, yang memiliki jiwa-jiwa luar biasa dalam berjuang menuntut ilmu bersama sama dari awal sampai akhir.
11. Keluarga KKN-R Angkatan 53 se-Kecamatan Barombong yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Keluarga besar KKN-R Angkatan 53 Desa Moncobalang yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
13. Keluarga besar UKM Pencak Silat Tapak Suci UIN Alauddin Makassar yang sudah memberikan pelajaran bukan hanya bela diri tapi banyak hal yang bisa di jadikan pembelajaran, dan yang senantiasa memberikan dukungan moril dan doa untuk menyelesaikan skripsi penulis.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 25 Juli 2017

Penyusun,

Muh. Arham Latif

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	14-48
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	14-21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Dasar Pidanaaan .....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
5. Tujuan Pidanaaan .....	20
B. Tinjauan Tentang Kejahatan .....	21-22
1. Kejahatan Dari Segi Yuridis .....	22
2. Kejahatan Dari Segi Sosiologis.....	23
C. Tinjauan Tentang Anak .....	23-32
1. Definisi Anak .....	23

2. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual .....	26
3. Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual .....	30
D. Perlindungan Terhadap Anak .....	32-36
1. Definisi Perlindungan Anak .....	32
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	33
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak .....	34
E. Tinjauan Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	36-44
1. Definisi Kejahatan Seksual .....	36
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak .....	40
3. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Kejahatan Seksual .....	42
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	45-51
1. Pertimbangan Yuridis .....	45
2. Pertimbangan Sosiologis .....	47
3. Umur Pelaku .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52-58</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Sumber Data .....	55
D. Metode Pengumpulan Data .....	56
E. Instrumen Penelitian .....	57
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	57
G. Penguji Keabsahan Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>59-90</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks .....	59
B. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Dalam Perkara Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, Dengan	

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91-93</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Implikasi Penelitian.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94-96</b>



## **ABSTRAK**

**Nama : Muh. Arham Latif**  
**Nim : 10500113176**  
**Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)? 2) Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks), memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan secara berulang, yakni sebanyak 3 kali dan seharusnya disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan. 2) Putusan hakim yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Salah satu poin dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak dengan hukum, dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup>

Negara yang menjamin keadilan bagi warga negaranya sebagai suatu syarat untuk mencapai kebahagiaan hidup serta diajarkan rasa susila dan segala aspek yang berkaitan dengan norma kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik dan terciptanya masyarakat yang damai. Kesetaraan hak hidup dan penerapan kaidah-kaidah agama juga menjadi poin terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang tentram tanpa adanya gangguan perbuatan kriminal.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, di

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 69.

adakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pula tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>3</sup>

Perilaku yang menyimpang akan melahirkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus. Kejahatan senantiasa menimbulkan keresahan bagi kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya di perlukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, meskipun dalam kenyataan untuk memberantas kejahatan sangat sulit mengingat pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan perkembangan masyarakat. Maka perlu adanya perlindungan-perlindungan yang ditegakkan oleh aparat pemerintah untuk setidaknya mengurangi kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, saat ini tindak pidana kejahatan seksual adalah persoalan yang semakin marak terjadi, tidak lepas dari seiring berkembangnya

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), h. 3.

<sup>3</sup> Sheila Masyita M, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak”*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), h. 1.



teknologi yang semakin maju yang membawa perubahan besar, dimana menjadi salah satu pendorong lahirnya kejahatan seksual terhadap anak. Teknologi yang semakin modern dan kecanggihannya untuk mengakses internet dengan mudah. Tapi di sisi lain, internet juga merupakan tempat dari konten-konten yang tidak layak dan tidak sepatutnya di contoh. Tayangan seperti ini umumnya menjadi alat pencuci otak bagi sebagian orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, sehingga berimbas rasa keinginan melakukan perilaku menyimpang kepada orang lain dengan cara pemaksaan, kekerasan, dan paling fatal melakukan pelecehan dan kejahatan kesusilaan kepada anak. Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya kejahatan semacam ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang tentunya juga turut berperan menentukan sejarah, maka dengan ini Negara berkewajiban melindungi dan memperhatikan perkembangan kejiwaannya karena bagaimana pun, anak adalah anugerah yang di

---

<sup>4</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Nkri 1945 (Jakarta, Sekretariat Jendral Mpr Ri, 2015), h. 66.

ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan berhak mendapat perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga dilahirkan.

Akan tetapi perlu di perhatikan, terkadang anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan semata menjadi korban. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kejahatan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum di sekolah, mudahnya mendapatkan narkoba di pasaran bebas, mudahnya mengakses *blue film* yang tidak layak ditonton anak via handphone, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa, dan prostitusi yang banyak di lokalisasi di perkotaan. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus perkosaan anak akan meningkat terus.<sup>5</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak secara garis besar akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun dalam perkembangan lain. Anak akan mengalami trauma berkepanjangan, melahirkan sikap yang tidak sehat, minder, rasa cemas yang berlebihan, terganggunya kejiwaan dan berujung

---

<sup>5</sup> Lisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak*, skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 5.

keterbelakangan mental. Kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan. Perilaku semacam ini adalah tindakan yang melanggar kesusilaan dan merusak harkat dan martabat seseorang. Undang-undang dengan tegas mengancam orang atau individu yang melanggar aturan tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, adalah upaya pemerintah untuk mereformasi hukum yang bertujuan untuk menjamin tercapainya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari sikap kekerasan dan diskriminasi. Namun seiring berjalannya waktu, aturan tersebut dirasa belum berjalan efektif karena masih banyaknya tumpang tindih antar peraturan sektoral terkait defisi anak, sehingga menurut paradigma ini, maka peraturan tersebut yang telah berlaku kurang lebih dua belas tahun, di ubah dan menghasilkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak dan resmi diberlakukan sejak tanggal 18 oktober 2014.

Untuk sanksi pidana dalam kasus semacam ini, telah di atur sendiri dalam KUHP yang terdapat pada pasal 289, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>6</sup>

Dalam pasal 76D dan pasal 81, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, secara eksplisit berbunyi:

---

<sup>6</sup> *Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhp*, (Yogyakarta: Laksana, 2014), h. 497

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<sup>7</sup>

Dan juga dalam pasal 76E dan pasal 82, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan anak, berbunyi:

“Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<sup>8</sup>

Dengan adanya aturan ini, masyarakat sepenuhnya bergantung kepada upaya pemerintah dan seluruh jajaran penegak hukum untuk menangani kasus semacam pelecehan serta kejahatan seksual terhadap anak.

Namun kadang, instansi penegak hukum seperti pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Ini tidak dapat dielakkan.<sup>9</sup>

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang maha esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim sendiri dan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan yang mana putusannya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>10</sup>

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan mengulas lebih dalam mengenai kekerasan seksual dan tindak kesusilaan, mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul,

**“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)”**

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), h. 73.

<sup>10</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 8.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa putusan pengadilan serta pandangan beberapa hakim di pengadilan negeri makassar tentang tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, serta pertimbangan dan hambatan yang di hadapi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang juga masih di bawah umur.

### **2. Deskripsi fokus**

#### **a) Putusan Hakim**

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>11</sup>

#### **b) Anak Dibawah Umur**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup> Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>11</sup> Sugi Aritonang, “*Hukum Dan Undang-Undang*”, <http://artonang.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-keputusan.html>, (diakses 04 April 2017).

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Perdilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 38.

c) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif, juga perbuatan yang bersifat pasif.<sup>13</sup>

d) Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.<sup>14</sup>

e) Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Yang bertempat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 50.

<sup>14</sup> Wienda Dida Prihandani, “*Definisi Kejahatan Seksual*”

<https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>, (diakses 04 April 2017).



### **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari beberapa masalah tindak kesusilaan di atas dan prosedur majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak serta merujuk pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka penulis menemukan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **D. Kajian Pustaka**

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka diperoleh beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

*Pertama*, Sheila Masyita M. dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, pada tahun 2016. Pada skripsi ini membahas mengenai Tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta penerapan hukum materil terhadap putusan majelis hakim. Adapun perbedaan penelitian saya dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas mengenai pencabulan terhadap anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisa putusan majelis hakim terhadap kejahatan seksual yang terjadi kepada

anak dibawah umur dan dilakukan oleh anak yang juga terhitung masih di bawah umur.

*Kedua*, Lisa dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak*, pada Tahun 2013. Pada skripsi ini membahas mengenai tindak pidana persetubuhan anak dan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Makassar, Adapun perbedaan penelitian saya dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas mengenai persetubuhan terhadap anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisa putusan majelis hakim terhadap kejahatan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur dan dilakukan oleh anak yang juga terhitung masih di bawah umur.

*Ketiga*, Hasbi Ash Siddiqi dalam skripsinya yang berjudul, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil*, pada tahun 2015. Pada skripsi ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual paedofil serta kesesuaian nya terhadap KUHP dan Undang-Undang perlindungan anak. Adapun perbedaan penelitian saya dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual paedofil, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisa putusan majelis hakim terhadap kejahatan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur dan dilakukan oleh anak yang juga terhitung masih di bawah umur.

Dari beberapa literatur yang ditemukan oleh penulis, belum ada yang membahas tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)

#### **E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Tujuan penelitian**

- a) Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks.
- b) Untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

##### **2. Kegunaan penelitian**

- a) Kegunaan teoritis

Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut dalam hal mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana kejahatan seksual terhadap anak.

b) Kegunaan praktis

- 1) Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan pada hukum pidana pada khususnya.
- 2) Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca mengenai tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menangani kasus kejahatan seksual dan tindak kesusilaan terhadap anak dibawah umur.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*

##### **1. Pengertian tindak pidana**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan seksual, baiknya kita mengerti definisi dari tindak pidana itu sendiri. Istilah Tindak pidana berasal dari bahasa latin, yakni *delictum* atau *delicta* yang berarti delik, dan dalam bahasa belanda tindak pidana lebih di kenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, artinya peristiwa yang dapat di pidana. Sementara delik yang dalam bahasa inggris di sebut *delict* memiliki makna suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman (pidana).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai *Strafbaar Feit*. Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, Sedangkan Menurut Pompei, Suatu *Strafbaar Feit* itu sebenarnya tidak lain adalah dari pada suatu

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 49.

tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Hazewinkel Suringa, Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya, Sedangkan J. E Jonkers, berpendapat bahwa, peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam islam tidak pidana lebih di kenal dengan *Jinayah*. Pengertian Jinayah sendiri adalah tindakan criminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Artinya istilah ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.<sup>2</sup>

Adapun Fikih *Jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Achmad Wardi Muslich bahwa fikih Jinayah adalah ilmu

---

<sup>2</sup> Hamsah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar, Alauddin Universty Press, 2014), h.1.

tentang syar'a yang berkaitan dengan masalah perbuatan manusia yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>3</sup>

Dari berbagai pengertian diatas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.<sup>4</sup>

## **2. Dasar pembedaan**

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara.

### **a) Ketuhanan**

Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pembedaan karena dendam dan pembalasan, melainkan pelaku telah berdosa. Hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, sedangkan negara bertindak sebagai pembuat Undang-undang. Penguasaan adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat.

---

<sup>3</sup> Hamsah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, h. 2.

<sup>4</sup> Hamsah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, h. 3.



b) Filsafah

Berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat dari *J.J.Roussdau*, bearti ada kesepakatan fiktif antara rakyat dan negara, itu bearti rakyat berdaulat dan menentukan pemerintahan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, setiap rakyat menyerahkan sebagian hak azasi kepada negara dengan imbalan perlindungan untuk kepentingan hukumnya dari negara.

c) Pelindungan Hukum (Yuridis)

Dasar dari pembedaan ini adalah bahwa penerapan hukum pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum.

**3. Jenis-jenis tindak pidana**

Dalam membahas hukum pidana, ada beberapa tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian serta kerusakan yang tidak sedikit. Tindak pidana di golongan dan dibedakan atas dasar dasar tertentu, yaitu, sebagai berikut.

- a) *Kejahatan dan Pelanggaran*
- b) *Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.*
- c) *Tindak Pidana Sengaja (Dolus) dan Tindak Pidana Kelalaian (Culpa).*
- d) *Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif*
- e) *Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.*

- f) *Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.*
- g) *Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.*
- h) *Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.*
- i) *Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan.*
- j) *Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.*
- k) *Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai*

#### **4. Unsur – unsur tindak pidana**

Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Akan tetapi terlebih dahulu sudah ada 2 aliran yang lebih di kenal dalam unsur tindak pidana itu sendiri, yakni;

- a) Aliran monistis
  - 1) Suatu perbuatan
  - 2) Melawan hukum
  - 3) Diancam dengan sanksi
  - 4) Dilakukan dengan kesalahan
  - 5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- b) Aliran dualistis
  - 1) Suatu perbuatan
  - 2) Melawan hukum (dilarang)

3) Diancam dengan sanksi pidana.<sup>5</sup>

Dalam teori lain, Pendapat Moeljatno, menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana/ Tindak Pidana, yaitu:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 218.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## 5. Tujuan pemidanaan

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang.

Tujuan Pemidanaan dapat dibedakan bisa dibedakan antara prevensi *special* dan prevensi *general* atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”.

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk melakukan tindak pidana lagi. Hal ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, ada 4 (empat) tujuan pemidanaan yang tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu, pandangan social defence, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spriritual berlandaskan Pancasila. Menurutny dari keempat tujuan pemidanaan tersebut dipertegas kembali dengan mencantumkan Pasal 50 ayat

(2) ang menyebutkan, pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.<sup>6</sup>

### ***B. Tinjauan Tentang Kejahatan***

Menurut B. Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Sedangkan Van Bammelen merumuskan, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>7</sup> Kejahatan dibedakan menjadi dua bagian yakni kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis.

Dalam Islam ada istilah dosa dan kejahatan. keduanya secara konseptual satu sisi memiliki makna yang terpisah tapi pada sisi lain keduanya bisa menyatu. Secara umum dosa adalah pelanggaran terhadap hukum agama. Akan tetapi pelanggaran tersebut bersifat individual dan sedikit sekali dampak sosialnya atau tidak berdampak sama sekali. Sedangkan kejahatan adalah tindakan melawan hukum (agama) yang membuatnya harus menerima sanksi di dunia dan boleh jadi juga di akhirat kelak. Kalau perbuatan dosa belum tentu dikategorikan sebagai tindak kejahatan, maka

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung, Mandar Maju, 1995), h. 90.

<sup>7</sup> Dewi Yani, "Hukum Dan Umum", <http://hukum-dan-umum.blogspot.co.id/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>, (diakses, 07 April 2017).

tindak kejahatan secara otomatis dikategorikan perbuatan dosa (maksiat). Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al- Isra /17:7, yang berbunyi:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْئِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”.(Q.S Al- Isra /17:7).<sup>8</sup>

### 1. Kejahatan dari segi yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku kesatu KUH Pidana (Selanjutnya di singkat KUH Pidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 385

## 2. **Kejahatan dari segi sosiologis**

Menurut topo santoso bahwa, “Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut R. Soesilo bahwa : “Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

### ***C. Tinjauan Tentang Anak***

#### **1. Definisi anak**

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan suatu Negara.

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 11.



Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.<sup>10</sup>

Dalam UUD 1945, definisi anak tertuang dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2015), h.15

<sup>11</sup> Andy Lesmanna, “*Definisi Anak*” <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, (diakses 13 November 2016).

Kewajiban orang tua adalah sudah pasti untuk menjamin anak mendapatkan kesejahteraan, meraih kebahagiaan, dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Karena sesungguhnya anak adalah harta yang paling berharga yang telah di anugerahkan tuhan kepada orang tua.

Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al- Kahfi /18:46, yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمْلًا ۗ

Terjemahnya:

“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapannya”.(Q.S Al- Kahfi /18:46).<sup>12</sup>

Sedangkan Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA), mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408.

## 2. Anak sebagai pelaku kejahatan seksual

Sebelum membahas kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur, terlebih dahulu penting untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan asusila semacam ini. Kenakalan anak dan unsur-unsur lain adalah bibit pertama yang menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan diluar batas.

Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orang tua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.<sup>14</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang

---

<sup>13</sup> Hukum Online.Com, “Sistem Peradilan Anak”  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, (diakses, 07 April 2017).

<sup>14</sup> Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), h. 8.

dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>15</sup>

Ada banyak faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan seksual, contohnya adalah doktrin dan pengaruh buruk dari lingkungan, apalagi pada jaman modern seperti saat ini, mereka dengan mudahnya mengakses konten-konten yang tidak seharusnya mereka saksikan. Menonton video pornografi dan pornoaksi, pernah melihat orang yang melakukan hubungan suami istri secara langsung, dan dibawah pengaruh alkohol, menjadikan mereka tidak bisa megontrol nafsu birahi. Anak anak dalam tahap seperti ini yang jiwa nya masih belum stabil, yang masih sangat penasaran dengan hal-hal baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang dewasa lakukan, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Perilaku kejahatan seksual sudah termasuk kedalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena mengakibatkan kerugian kepada korban baik secara fisik maupun mental. Peraturan ini sudah di tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pemidanaan terhadap anak umumnya hampir sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, tapi mengingat adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka harus ada pertimbangan antara perbuatan, hukuman dan

---

<sup>15</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 103.

perkembangan anak dimasa yang akan datang. Di Indonesia ada Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengkategorikan batas usia.

Menurut Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak yang di atur dalam Undang - Undang tersebut adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 (SPPA), terdiri atas :

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Disini tampak bahwa pembentuk Undang-Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologis anak.<sup>16</sup>

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>17</sup>

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa juga penting dan harus dilakukan untuk menghindari labelisasi.

---

<sup>16</sup> Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, h. 25.

<sup>17</sup> Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, h. 31

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana , karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>18</sup>

Akan tetapi tindak pidana tetaplah kejahatan yang harus mendapat sanksi dan hukuman karena mengandung unsur akibat yang meresahkan warga masyarakat, mendatangkan kerusakan baik pada perseorangan maupun terhadap suatu kelompok. Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.<sup>19</sup>

### **3. Anak sebagai korban kejahatan seksual**

Ada banyak fenomena kejahatan yang dialami oleh anak, baik secara fisik, psikis maupun seksual. kejahatan seksual adalah perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan, menyebabkan akibat buruk dan besar dalam jangka panjang, anak akan mengalami trauma berkepanjangan. Kejahatan seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibisionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung

---

<sup>18</sup> Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, (Bandung; Armico, 1983), h. 95.

<sup>19</sup> Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, h. 143.

antara anak dengan orang dewasa atau sesama anak dibawah umur tapi dengan umur yang lebih tua dari korban (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

Kejahatan dan kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur dimana-mana. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia.<sup>20</sup>

Usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- d) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2).
- e) Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.

---

<sup>20</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, h. 52.



Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

#### ***D. Perlindungan Terhadap Anak***

##### **1. Definisi perlindungan anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>21</sup>

Dalam bentuknya paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak kan menerima apa yang mereka butuhkan, berkembang dan tumbuh.

Empat hak dasar anak menurut Kak Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan Anak :

##### **a) Hak hidup lebih layak**

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 40.

- b) Hak untuk tumbuh dan berkembang
- c) Hak perlindungan
- d) Hak berpartisipasi / Hak partisipasi

## 2. Prinsip - prinsip perlindungan anak

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah, anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *The Best Interest Of The Child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorence*) karena usia perkembangannya.

- c) Ancangan daur kehidupan kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu

dilindungi dengan gizi, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

d) Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengrusakan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>22</sup>

### **3. Bentuk – bentuk perlindungan anak dalam perundang-undangan**

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Masalah perlindungan hukum bagi anak – anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak di Indonesia.

Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 berbunyi “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”<sup>23</sup>,

---

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 47.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Selanjutnya dalam pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak”.<sup>24</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perundang-undangan tercantum dalam pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut;

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Pemisahan dari orang dewasa;
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- k) Pemberian advokasi sosial;
- l) Pemberian kehidupan pribadi;
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n) Pemberian pendidikan;
- o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

### ***E. Tinjauan Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak***

#### **1. Definisi kejahatan seksual**

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.<sup>25</sup>

Bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*) juga adalah salah satu praktek seks yang menyimpang. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki

---

<sup>25</sup> Wienda Dida Prihandani, “Definisi Kejahatan Seksual” <https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>, (diakses 04 April 2017).

kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.<sup>26</sup>

Hasil dokumentasi Komnas Perempuan, menyatakan ditemukan ada 14 bentuk yang merupakan kekerasan seksual, diantaranya:

- a) Perkosaan
- b) Pelecehan seksual (verbal, gerak tubuh, pandangan mata)
- c) Eksploitasi seksual
- d) Penyiksaan seksual
- e) Perbudakan seksual
- f) Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- g) Prostitusi paksa
- h) Pemaksaan kehamilan
- i) Pemaksaan aborsi
- j) Pemaksaan perkawinan
- k) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- l) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama
- m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

---

<sup>26</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), h. 32.

- n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi gender.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditegah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>27</sup>

Kejahatan seksual umumnya juga dapat di artikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang merasa terintimidasi secara seksual, merasa terendahkan dan terambil kehormatan dan harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak (verbal, gerak tubuh, pandangan mata, dan sebagainya). Kejahatan seksual dirumuskan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan setiap tindakan seksual sesungguhnya merupakan suatu tindak kriminal yang harus ditindak, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).

Dalam islam, kejahatan seksual dan perbuatan yang menyangkut kesusilaan lainnya digolongkan kedalam perbuatan zina. Hal ini adalah suatu perilaku yang dilarang dan dimurkai oleh Allah swt sehingga dapat menimbulkan kerugian dan

---

<sup>27</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, h. 32.

digolongkan kedalam dosa besar. Sesuai firman Allah swt dalam Q.S Al-Isra/ 17: 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra / 17:32).<sup>28</sup>

Meskipun ada banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kejahatan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal tindak pidana ini sudah diatur dalam pasal 285 dan 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>29</sup>

#### Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 388.

<sup>29</sup> *Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap*, h. 497

<sup>30</sup> *Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap*, h. 497



## 2. Faktor penyebab tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak

Ada banyak persamaan tentang kekerasan seksual, persetubuhan, pencabulan, perbuatan asusila, pelecehan dan pemerkosaan. Faktor hingga penyebab lahirnya tindak pidana semacam ini hampir semua bermotif sama. Kaum wanita dan anak dibawah umur yang umumnya menjadi sasaran kejahatan, memiliki banyak kelengahan dan kelemahan untuk dijadikan korban pelecehan, pencabulan, kekerasan seksual, hingga pemerkosaan.

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungan dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereskrimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.<sup>31</sup>

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak, perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujuk-rayu, penampilan

---

<sup>31</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, h. 66

dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkan berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku).<sup>32</sup>

Ada beberapa faktor penyebab para pelaku tindak pidana melakukan kejahatan seksual bahkan terhadap anak di bawah umur dari sejumlah pendapat pakar yang di simpulkan. Setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

- a) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbut tidak senonoh dan jahat.
- b) Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- c) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma

---

<sup>32</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, h. 70

keagamaan kurang mendapatkan response dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

- e) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- g) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.<sup>33</sup>

### **3. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan seksual**

Kejahatan seksual dan pemerkosaan memiliki dampak yang luar biasa bagi korbannya, bukan hanya dari segi fisik tapi juga dari aspek psikologis. Kejahatan seksual menyebabkan dampak yang amat dalam pada psikologi seseorang, diantaranya depresi yang kemudian menyebabkan rusaknya pola pikir, Para korban pelecehan seksual itu cenderung tertutup, sulit beradaptasi, bermuatan energi negatif dan sensitif.

---

<sup>33</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, h. 72

Kebanyakan korban kejahatan seksual dan pemerkosaan merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), gejala-gejalanya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis tersebut yang dialaminya.

Korban yang mengalami kejahatan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Pakar berpendapat ada empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

a) *Betrayal* (penghianatan)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b) *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ini yang kadang menjadikan korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c) *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak

mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

d) *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Lebih buruk lagi akibatnya jika korban adalah anak yang masih di bawah umur. Seorang anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual, tidak hanya akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, tapi juga bisa mengalami trauma berkepanjangan, bahkan hingga beranjak dewasa. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak ini akan sulit dihilangkan kalau tidak segera ditangani oleh ahlinya. Dampak buruk psikologis yang dialami oleh anak akan berlangsung berkepanjangan, dan itu dapat menjadi salah satu faktor yang membuat anak tumbuh menjadi pelaku kejahatan dikarenakan kekerasan dan perbuatan buruk yang dialaminya sewaktu kecil.

### ***F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan***

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.<sup>34</sup>

Seperti yang ditegaskan oleh para filsuf yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi dalam tahap keputusan, ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.<sup>35</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi tiga kategori, yakni;

#### **1. Pertimbangan yuridis**

---

<sup>34</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Diadit Media, 2010) h. 27.

<sup>35</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, h. 52.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Keterangan terdakwa
- c) Keterangan saksi
- d) Barang-barang bukti
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

## **2. Pertimbangan sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan terdakwa;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap batin membuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

## **3. Umur pelaku**

Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan -aturan yang



mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.<sup>36</sup>

Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1982), h. 147.

<sup>37</sup> Sholeh Soeaidy, Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 19.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.<sup>38</sup>

Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak, ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang Peradilan Anak.<sup>39</sup>

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus

---

<sup>38</sup> E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 19.

<sup>39</sup> Sri Widoyati, *Kenakalan Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 17.

diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a) Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal;

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda, atau
- 4) Pidana pengawasan.

b) Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Perampasan barang-barang tertentu
- 2) Pembayaran ganti rugi.

c) Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:<sup>40</sup>

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 27.

- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja,
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan.

Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain.

Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, h. 29.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

###### 1. Jenis penelitian

Untuk menyelesaikan skripsi ini, salah satu tahap yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>1</sup>

Terdapat banyak jenis penelitian, baik berdasarkan pada tujuannya, dasar kegunaannya, lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, maupun dasar metode utamanya yang dipakai. Menurut Yulius Slamet, jenis penelitian berdasarkan pada tujuannya terbagi atas penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.<sup>2</sup>

Jenis penelitian berdasarkan atas dasar kegunaannya dibagi menjadi penelitian murni (*pure research* atau *basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*).

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet III; Jakarta: UI-Press, 1986) , h. 14.

<sup>2</sup> Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), h. 65.

Menurut Suriasumantri<sup>3</sup> bahwa jenis penelitian menurut metodenya terbagi atas penelitian historis (*historical research*), penelitian survey, penelitian *ex post facto*, penelitian eksperimen (*experimental research*), penelitian evaluasi (*evaluation research*), penelitian pengembangan (*research development*), penelitian tindakan (*action research*), penelitian naturalistik, dan penelitian kebijakan (*policy research*). Adapun jenis penelitian dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, terbagi atas penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan laboratorium. Sedangkan jenis-jenis penelitian yang dibedakan atas dasar metode utamanya yang dipakai terbagi atas penelitian survey, penelitian kasus (*case research*), penelitian eksperimen (*experimental research*), penelitian grounded (*grounded research*).<sup>4</sup> Sedangkan menurut Sukmadinata<sup>5</sup> menurut jenis data dan analisisnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Dan masih banyak lagi jenis penelitian lainnya seperti menurut tingkat ekplanasi (penjelasannya), menurut tingkat menurut sifat permasalahannya, dan lain-lain.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka dalam penyusunan skripsi ini digunakan istilah jenis penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dikenal

---

<sup>3</sup> Suriasumantri dan Irawan Seohartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 64-66.

<sup>4</sup> Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial*, h. 71.

<sup>5</sup> Sukmadinata dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), h. 34.

dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang masih dibawah umur serta kendala – kendala yang di alami oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana, Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk melihat pertimbangan putusan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **2. Lokasi penelitian**

Salah satu proses dalam penyusunan skripsi ini adalah melakukan sebuah penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh peneliti terhadap permohonan pengajuan analisis putusan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.

Lokasi penelitian-penelitian tersebut dipilih karena penulis menganggap bahwa lokasi tersebut berhubungan langsung dengan objek penyusunan skripsi dan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan masalah.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang dilakukan oleh peneliti terdapat dua sumber data yaitu:

#### **1. Data primer**

Data Primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, dan Hadist, serta pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada para hakim yang menangani kasus kejahatan seksual, juga berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

#### **2. Data sekunder**

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>6</sup> Terkadang juga data sekunder memiliki isi atau memiliki data primer yang membuat data sekunder menjadi bahan utama dalam penelitian yang dilakukan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 21.



### 3. Data tersier

Data Tersier adalah bahan yaang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang belum jelas pahami seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### D. *Metode Pengumpulan Data*

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, dengan studi kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Adapun yang di maksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki.

##### 2. Teknik wawancara

Pada penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancaraa untuk mengumpulkan data. Ada pun data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada responden (Hakim yang menangani kasus kejahatan seksual dan pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual yang masih dibawah umur).

##### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. metode ini di gunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet: V, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004), h. 58.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti telah di validasi meliputi, pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logika.

Penelitian kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, dan analisis.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dilapangan direduksikan dengan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pegabstrakan, transfoormasi data kasar yang muncul dilapangan dengan penajaman teknis analisis, dideskripsikan, kemudian ditafsirkan.

#### **2. Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deksriptif kualitatif, yaitu analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responded secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut :

1. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks.***

##### **1. Kronologi kasus**

Pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Muhajrin alias Aji melakukan serangkaian kejahatan seksual berupa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang bernama Azura Safwana Rubina alias Azura yang bertempat di Jalan Maccini Pasar Malam IV Makassar. Kejadian berawal ketika Saksi Azura Safwana Rubina alias Azura (Korban yang masih berumur 5 tahun) sedang bermain di rumah anak Saksi Nurqalam Alfira Syam alias Alfira dan Siti (adik Terdakwa), kemudian setelah bermain, Saksi Azura Safwana Rubina alias Azura dan Saksi Nurqalam Alfira Syam alias Alfira hendak pulang kerumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi Azura Safwana Rubina alias Azura kedepan kamar mandi setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi Azura Safwana Rubina alias Azura lalu Terdakwa mengatakan kepada korban *“Janganko keluar rumah, kalau keluarko nabombeko Siti”* lalu Terdakwa membuka celana dalam korban kemudian memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Azura Safwana Rubina alias Azura sambil menggosok-gosokkan sehingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dimana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi Azura Safwana Rubina alias Azura sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban mengalami rasa sakit dan trauma.

## 2. Identitas terdakwa

Nama lengkap : MUHAJRIN Alias AJI  
 Tempat lahir : Ujung Pandang  
 Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun / 22 April 1999  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Jl. Maccini Pasar Malam IV. Makassar  
 Agama : I s l a m  
 Pekerjaan : Buruh Harian  
 Pendidikan : SD ( Kelas III )

## 3. *Dakwaan penuntut umum*

### **ALTERATIF**

#### ***PERTAMA***

Bahwa ia terdakwa Muhajrin Alias Aji pada hari Selasa. Tanggal, 02 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan Maccini Pasar Malam IV Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura (korban yang masih berumur 5 tahun) sedang

bermain dirumah anak Saksi Nurqalam Alfira Syam Alias Alfira Dan Siti (adik Anak), kemudian setelah bermain Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura dan Saksi Nurqalam Alfira Syam Alias Alfira hendak pulang kerumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura kedepan kamar mandi setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi Azura Safwana Rubina Alias Azura lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “*Janganko keluar rumah, kalau keluarko nabombeko Siti*” lalu Terdakwa membuka celana dalam korban kemudian memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura sambil menggosok-gosokkan sehingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dimana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban mengalami rasa sakit dan trauma. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara instalasi kedokteran forensik Nomor : 007/IV/2015/Forensik tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mauluddin, M, Sp. F**, yang hasilnya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

a) Alat Kelamin Wanita :

- Serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) tampak kemeraan (hipermis).
- Selaput dara (*hymen*) : ditemukan luka robek baru pada arah jam 3 dan jam 9 sampai dasar dan tidak berdarah.
- Liang senggama (*introitus Vaginae*) : tampak luka lecet.

b) Perlukaan yang ditemukan pada bagian tubuh lainnya : tidak ada.

c) Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan : tidak dilakukan
- USG : tidak dilakukan.

**Kesimpulan :**

- a) Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan, dan berusia anak.
- b) Ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban
- c) Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

***KEDUA***

Bahwa ia terdakwa Muhajir Alias Aji, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura (korban yang masih berumur 5 tahun) sedang bermain dirumah anak Saksi Nurqalam Alfira Syam Alias Alfira dan Siti (adik

Anak), kemudian setelah bermain setelah bermain Saksi Azura Safwana Rubina alias Azura dan Saksi Nurqalam Alfira Syam alias Alfira hendak pulang kerumahnya lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura kedepan kamar mandi setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi Azura Safwana Rubina Alias Azura lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “*Janganko keluar rumah, kalau keluarko nabombeko Siti*” lalu Terdakwa membuka celana dalam korban kemudian memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura sambil menggosok-gosokkan sehingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dimana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban mengalami rasa sakit dan trauma. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara instalasi kedokteran forensik Nomor : 007/IV/2015/Forensik tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mauluddin, M, Sp. F**, yang hasilnya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

a) Alat Kelamin Wanita :

- Serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) tampak kemeraan (hipermis).
- Selaput dara (*hymen*) : ditemukan luka robek baru pada arah jam 3 dan jam 9 sampai dasar dan tidak berdarah.
- Liang senggama (*introitus Vaginae*) : tampak luka lecet.

b) Perlukaan yang ditemukan pada bagian tubuh lainnya : tidak ada.



c) Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan : tidak dilakukan
- USG : tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- a) Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan, dan berusia anak.
- b) Ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban
- c) Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa Muhajir Alias Aji, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dalam dakwaan Pertama dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura (korban yang masih berumur 5 tahun) sedang bermain di rumah anak Saksi Nurqalam Alfira Syam Alias Alfira dan Siti (adik Anak), kemudian setelah bermain setelah bermain Saksi Azura Safwana Rubina alias Azura dan Saksi Nurqalam Alfira Syam alias Alfira hendak pulang kerumahnya lalu

tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura kedepan kamar mandi setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi Azura Safwana Rubina Alias Azura lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “*Janganko keluar rumah, kalau keluarko nabombeko Siti*” lalu Terdakwa membuka celana dalam korban kemudian memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura sambil menggosok-gosokkan sehingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dimana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban mengalami rasa sakit dan trauma. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara instalasi kedokteran forensik Nomor : 007/IV/2015/Forensik tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mauluddin, M, Sp. F**, yang hasilnya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a) Alat Kelamin Wanita :
  - Serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) tampak kemeraan (hipermis).
  - Selaput dara (*hymen*) : ditemukan luka robek baru pada arah jam 3 dan jam 9 sampai dasar dan tidak berdarah.
  - Liang senggama (*introitus Vaginae*) : tampak luka lecet.
- b) Perlukaan yang ditemukan pada bagian tubuh lainnya : tidak ada.
- c) Pemeriksaan Penunjang :
  - Tes kehamilan : tidak dilakukan

- USG : tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- a) Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan, dan berusia anak.
- b) Ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban
- c) Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**4. Tuntutan penuntut umum**

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut,

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAJRIN alias AJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kedua
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAJRIN alias AJI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

## 5. Amar putusan

Dari alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka dari itu sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku, perlu adanya pertimbangan hal-hal yang dijadikan landasan sebagai alasan penebusan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya si pelaku harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggung jawabkan segala kesalahannya.

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

- 1) Menyatakan terdawa MUHAJRIN alias AJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya” dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar anak tetap ditahan;
- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

#### **6. Pertimbangan hakim**

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan.<sup>1</sup> Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa

---

<sup>1</sup> Widiarso (48 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Mei 2017.

yang bersalah melakukannya.<sup>2</sup> Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut.

- a) Bahwa benar awalnya pada hari Selasa. Tanggal, 02 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita ketika terdakwa pulang dari warnet ke rumahnya di jalan Maccini Pasar Malam IV Makassar, terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yang bernama Siti dan temannya, yakni saksi korban yang bernama Azura Safwana Rubina alias Azura, dan saksi Nur Qalam Alfira Syam alias Alfira, setelah itu terdakwa memanggil saksi korban dan diajak duduk, setelah itu anak memberi gula-gula dan berjanji pada saksi korban akan diberi makan, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi, lalu di depan kamar mandi terdakwa membuka celana saksi korban, karena terdakwa punya kemaluan dalam keadaan berdiri (tegang), kemudian anak melepaskan celananya sendiri, lalu mengeluarkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang, lalu berusaha memasukkan dengan cara menggosok-gosokkannya ke kemaluan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan menangis.

---

<sup>2</sup> Lamintang Dan The Lamintang , *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h. 407.

- b) Bahwa benar, sebelum anak melakukan hal tersebut, terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban *“Janganko keluar rumah, kalau keluarko nabombeko Siti”* dan terdakwa juga mengatakan *“Kalo tidak mauko ganrang sama saya kusuruh bombekko sama Siti”*.
- c) Bahwa terdakwa mengakui, dirinya sudah melakukan perbuatan serupa terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WITA, kedua tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WITA dan yang ketiga tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 11.00 WITA.
- d) Bahwa terdakwa mengakui, dirinya melakukan hal tersebut terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kemaluan terdakwa tidak masuk tetapi hanya di gosok-gosokkan saja di permukaan kemaluan korban, yang kedua kemaluan terdakwa gosok-gosok tapi masuk sedikit saja dan yang ketiga sama juga gosok-gosok tapi kemaluan terdakwa masuk hanya sedikit.
- e) Bahwa terdakwa mengakui, dirinya melakukan perbuatan tersebut di rumahnya di jalan Maccini Pasar Malam IV Makassar, yang pertama dan kedua di kamar ibu terdakwa, sedangkan yang ketiga di kamar mandi.
- f) Bahwa benar perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut dilihat oleh saksi dan kemudian saksi mengadukannya kepada saksi Asniati alias Nini (Ibu kandung Korban), yang kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi dan membawa korban ke dokter untuk di periksa dan buat di visum.
- g) Bahwa benar setelah kejadian, kalau anak korban mengalami sakit dan menjadi trauma, ketakutan kalau melihat terdakwa dan sering menangis.

- h) Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara instalasi kedokteran forensik Nomor : 007/IV/2015/Forensik tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, M, Sp. F, yang hasilnya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Alat Kelamin Wanita :

- Serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) tampak kemeraan (hipermis).
- Selaput dara (*hymen*) : ditemukan luka robek baru pada arah jam 3 dan jam 9 sampai dasar dan tidak berdarah.
- Liang senggama (*introitus Vaginae*) : tampak luka lecet.

2. Perlukaan yang ditemukan pada bagian tubuh lainnya : tidak ada.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan : tidak dilakukan
- USG : tidak dilakukan.

Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan :

**a. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.



Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan orang bernama Muhajrin alias Aji yang setelah melalui pemeriksaan ditngkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan dipersidangan tersebut adalah benar anak yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai identitas anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang isitem peradilan pidana Anak, disebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa karena anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak tersebut terjadi ketika mereka belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut masih termasuk kategori anak, dan dalam mengadili para anak tersebut berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi.

**b. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” di sini, maksudnya adalah “*tahu dan menghendaki*” peristiwa pidana sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga dan unsur keempat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka lebih tepat bilamana unsur ke tiga dan unsur ke empat dipertimbangkan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*”, maksudnya adalah untuk dapat melakukan “*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” harus didahului dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur keempat “*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar dan diakui oleh Anak, bahwa pada hari selasa, tanggal, 02 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita ketika anak pulang dari warnet ke rumahnya di jalan Maccini Pasar Malam IV Makassar, anak bertemu dengan adik anak yang bernama Siti dan temannya, yakni saksi korban yang bernama Azura Safwana Rubina alias Azura, dan saksi Nur Qalam Alfira Syam alias Alfira, setelah itu anak memanggil saksi korban dan diajak duduk, setelah itu anak memberi gula-gula dan berjanji pada saksi korban akan diberi makan, kemudian anak mengajak saksi korban ke kamar mandi, lalu di depan kamar mandi anak membuka celana saksi korban, karena anak

punya kemaluan dalam keadaan berdiri (tegang), kemudian anak melepaskan celananya sendiri, lalu mengeluarkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang, lalu berusaha memasukkan dengan cara menggosok-gosokkannya ke kemaluan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan menangis. Anak juga mengakui, waktu dirinya melakukan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama kemaluan terdakwa tidak masuk tetapi hanya di gosok-gosokkan saja di permukaan kemaluan korban, yang kedua kemaluan terdakwa gosok-gosok tapi masuk sedikit saja dan yang ketiga sama juga gosok-gosok tapi kemaluan terdakwa masuk hanya sedikit.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum atas nama anak korban, dari Rumah Sakit Bhayangkara Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : 007/VI/2015/Forensik tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, M, Sp,F., ditemukan tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur keempat *“untuk melakukan persetubuhan dengannya”* telah terpenuhi.

**c. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *“melakukan tipu muslihat”* atau *“akal cerdas”* adalah : *“suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan serangkaian kebohongan*” atau “*karangan perkataan bohong*” adalah : “*satu kata bohong tidak cukup, di sini harus di pakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan ceritera sesuatu seakan-akan benar*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah : “*melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu*”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar, untuk dapat melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari selasa, tanggal, 02 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita dirumah anak di jalan Maccini Pasar Malam IV Makassar, anak terlebih dahulu memanggil anak korban dan diajak duduk, setelah itu anak memberi gula-gula dan berjanji pada saksi korban akan diberi makan, kemudian anak mengajak saksi korban ke kamar mandi, lalu di depan kamar mandi anak membuka celana saksi korban, karena anak punya kemaluan dalam keadaan berdiri (tegang), kemudian anak melepaskan celananya sendiri, lalu mengeluarkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang, lalu berusaha memasukkan dengan cara menggosok-gosokkannya ke kemaluan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan menangis. Anak juga mengakui, waktu dirinya melakukan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa sebelum anak melakukan perbuatan tersebut anak mengatakan kepada anak korban, *“janganko keluar rumah, kalau keluarko nabombeko Siti”* dan anak juga mengatakan *“kalau tdk mauko ganrang sama saya kusuruh bombekko sama Siti”*.

Menimbang, bahwa pemberian gula-gula dan janji untuk diberi makan serta perkataan anak kepada anak korban, *“janganko keluar rumah, kalau keluarko nabombeko Siti”* dan anak juga mengatakan *“kalau tdk mauko ganrang sama saya kusuruh bombekko sama Siti”* dapat dikategorikan sebagai bujukan terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga yaitu “membujuk” telah terpenuhi.

**d. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda, yang pertama kemaluan terdakwa tidak masuk tetapi hanya di gosok-gosokkan saja di permukaan kemaluan korban, yang kedua kemaluan terkdawa gosok-gosok tapi masuk sedikit saja dan yang ketiga sama juga gosok-gosok tapi kemaluan terdakwa masuk hanya sedikit.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan perbuatan telah di lakukan 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda tersebut, unsur ke dua *“dengan sengaja”* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka anak harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, hakim anak tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan anak dari tuntutan hukum, oleh karenanya hakim anak berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidanaa atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanisiaan (*vide pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak*).

Menimbang, bahwa pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam laporan penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, merekomendasikan perlunya anak di bina dalam lapas untuk merubah sikap dan perilakunya atau diberi tindakan yakni diserahkan ke LPKS guna mendapatkan pendidikan dan keterampilan demi masa depannya.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasehat hukum anak telah memohonkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan (*vide pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak*). Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (*vide pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak*).

Menimbang, bahwa atas perbuatannya itu anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa karena umur para anak sudah mendekati dewasa dan tindak pidana yang dilakukan para abak adalah “persetubuhan terhadap anak” adalah tepat bilamana terhadap anak tersebut dijatuhi pidana penjara dan denda.

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,

dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertahankan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*), Ketentuan tersebut berlaku pula dalam ppidanaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak, hakim anak terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak telah mengakibatkan trauma pada diri anak korban
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan berterus-terang di persidangan
- Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya
- Anak belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan ppidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.



Menimbang, bahwa merupakan otoritas hakim anak untuk menjatuhkan pidana terhadap anak dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan anak, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) anak.

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri anak, yang pada gilirannya anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya anak telah mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana yang dijatuhkan terhadap diri anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini di pandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap anak sementara masa penahanan terhadap anak masih ada, maka harus diperintahkan agar anak tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijaatuhi pidana maka ia harus pula di bebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan anak Muhajri alias Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Mengajukan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juttaa rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan.
5. Membenarkan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

## **7. Analisis penulis**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak

bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan, namun adanya kendala disebabkan hakim yang memutus perkara tersebut sudah tidak berada ditempat dan sulit untuk dihubungi. Maka dari itu penulis hanya melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang pernah menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, yaitu Widiarso<sup>3</sup>, untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap anak. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan menyatakan bahwa:

Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata.

---

<sup>3</sup> Widiarso (39 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 Mei 2017.

Anak yang menjadi pelaku, baik itu pelaku kekerasan, pembunuhan, pencurian maupun pemerkosaan, bisa saja disebut korban. Maksudnya yakni, ia menjadi korban dari pengaruh lingkungan yang salah, baik itu dalam lingkup bermasyarakat, pergaulan, dan keluarga sehingga anak sebagai pelaku harus tetap mendapatkan perlindungan karena umumnya kesalahan anak itu bersifat kolektif. Hal ini tentu saja tanggung jawab dari orang tua dan Negara. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya adalah korban dari pendidikan yang bobrok, maka dari itu anak tidak boleh lepas dari pengawasan.

Merujuk dari putusan nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum Et Repertum* yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa terdakwa Muhajrin Alias Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban Azura Safwana Rubina Alias Azura yang masih dibawah umur.

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim disebabkan dalam surat dakwaan tidak memuat pasal 64 ayat (1) tentang tindak pidana secara berlanjut, sebab dalam fakta dipersidangan terdakwa sudah jelas melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan seharusnya hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sudah tepat jika

terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Dalam pertimbangan hakim yang di analisis oleh penulis, ada beberapa keadaan-keadaan yang memberatkan yakni, perbuatan anak telah mengakibatkan trauma pada diri korban dan perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan ialah anak bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan anak belum pernah dihukum. Disini tetera jelas bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut terhadap anak dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, tidak dimuat kedalam hal-hal yang memberatkan, mengingat perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terdapat pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka menurut penulis, seharusnya hakim menjuntokan pasal 64 ayat (1) KUHP sebab semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang dan tentunya dapat memberatkan terdakwa.

Pertimbangan hukum Hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana

lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 (Tujuh) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 5 (lima) tahun penjara dan denda sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan tetapi saksi pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman dalam pasal yang didakwakan sebab hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Instalasi Kedokteran Forensik Makassar yang menyatakan bahwa korban mengalami luka lecet pada liang senggama, adanya luka sobek pada selaput dara, kemerahan pada serambi kemaluan, serta gangguan psikis saat menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya.

Dipandang dari segi dampak negatif, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit pada alat kemaluannya karena selaput dara telah lecet dan sobek. Hal ini tentu membawa konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarga korban, suatu harga mati yang tidak dapat dibayar dengan hukuman minimal tersebut, bahkan uangpun tidak dapat menggantinya dan tidak akan terbayarkan sampai mati. Dampak psikologis dan kejiwaan yang membawa trauma sepanjang hidup korban tidak terkirakan entah kapan akan berakhir. Sebab setiap kali melihat lelaki maka bayangan kejadian

tersebut akan terulang kembali, belum lagi rasa malu yang harus korban hadapi dalam lingkungannya.

**B. *Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Dalam Perkara Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***

Dalam menangani perkara pidana anak, baik itu ia sebagai korban maupun pelaku memang harus dilandaskan pada Undang-undang yang di atur dan di khususkan untuk menangani anak itu sendiri. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mencakup tentang hukum materiil serta Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai sumber hukum formil yang eksplisit mengatur tentang hukum acaranya.

Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan peraturan undang-undang yang di bahas oleh penulis, maka terlebih dahulu harus jeli menganalisa putusan hakim dan peraturan mana saja yang terdapat tumpang tindih dan dianggap tidak efektif serta mencari kekeliruan yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu penulis melakukan analisis dalam amar putusan yang di tetapkan oleh hakim dalam perkara nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, sebagai berikut.

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan anak MUHAJRIN alias AJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya” dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar anak tetap ditahan;
- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok atau tambahan kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan harus di pertimbangkan dan di putuskan sebaik-baiknya. Mengingat untuk anak yang berhadapan dengan hukum akan berdampak bagi psikologisnya dan mendapat banyak stigma negatif, baik dari pribadi maupun lingkungannya. Akan tetapi harus

di pertimbangkan juga dari sisi korban yang telah menjadi sasaran kejahatan pelaku yang mendatangkan dampak kerugian yang tidak sedikit.

### **1. Analisis penulis**

Merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum artinya, didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta.

Menurut penulis, dalam pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.<sup>4</sup> Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman apabila tidak mampu memenuhi hukuman denda yang ditetapkan.

Akan tetapi dalam amar putusan dalam perkara nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, tidak menyertakan penggantian hukuman perihal pelatihan kerja kepada pelaku. Hakim memutus hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidak sesuaian antara putusan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Namun, Widiarso sebagai hakim di Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak lain berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan berlandaskan pada undang – undang dan hukum beracara dalam pidana anak. Ia juga menjelaskan bahwa hakim memiliki hak yang merdeka untuk memutuskan perkara pidana, artinya keputusan hakim tidak tunduk pada dakwaan penuntut umum, bisa saja menyetujui surat dakwaan dan bisa saja bertentangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung oleh data, informasi dan fakta yang mengenai hasil putusan hakim nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (studi putusan nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang hukum perlindungan anak, Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa unsur, yakni unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana semuanya telah dijelaskan secara rinci. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang perlindungan anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Sebab dalam fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan secara berulang, yakni sebanyak 3 (tiga) kali dan hakim

tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu hal-hal yang memberatkan. Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya 5 (lima) tahun penjara dan tuntutan penuntut umum yakni pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan maksimal pidana penjara tindak pidana persetubuhan adalah maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

2. Putusan hakim Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu poin dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman apabila tidak mampu memenuhi hukuman denda yang ditetapkan seperti pelatihan kerja. Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentu ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan.

## **B. *Implikasi Penelitian***

1. Dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya
2. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam proses penuntutan dan penjatuhan hukuman sanksi yang kepada pelaku bisa memberi efek jera tapi tetap tidak melanggar hak-hak pelaku yang merupakan anak terutama dari aspek penerapan hukum pidana materil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arbijoto. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung; Armico, 1983.

———. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung; Mandar Maju, 1995.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hasan, Hamsah. *Hukum Pidana Islam 1*. Makassar: Alauddin Universty Press, 2014.

*Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap*. Yogyakarta: Laksana, 2014.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

Lamintang dan The Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia , 1982.

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

- Slamet, Yulius. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. 2006.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet III; Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sukmadinata dan Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sumantri, Suria. dan Irawan Seohartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sumaryono, E. *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Usman, Husaini, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Cet: V: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Widoyati, Sri. *Kenakalan Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

## B. Website

- Aritonang, Sugi. “Hukum Dan Undang-Undang”.  
<http://artanang.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-keputusan.html> (diakses, 04 April 2017).
- Hukum Online.Com, “Sistem Peradilan Pidana Anak”.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting->



*yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak* (diakses, 07 April 2017).

Lesmanna, Andy. “*Definisi Anak*” <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> (diakses, 13 November 2016).

Prihandani, Wienda Dida. “*Definisi Kejahatan Seksual*” <https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual> (diakses 04 April 2017).

Yani, Dewi. “*Hukum Dan Umum*”. <http://hukum-dan-umum.blogspot.co.id/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html> (diakses, 07 April 2017).

### **C. Skripsi**

Masyita M, Sheila. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Lisa, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak*”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Ash Siddiqi , Hasbi. “*Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil*”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

### **D. Undang – Undang**

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Comlude Comlude.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: MUHAJRIN alias AJI.
Tempat lahir	: Ujung Pandang.
Umur atau tanggal lahir	: 16 tahun / 22 April 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Maccini Pasar Malam IV, Makassar.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh harian.

Anak ditangkap pada tanggal 04 Juni 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Makassar, oleh :

- Penyidik, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015, diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Makassar selaku Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
- Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2015;
- Hakim Anak, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;

Anak didampingi oleh :

1. **BAHARUDDIN** Ayali Kandung Anak;
  2. **SATRIA** Ibu Kandung Anak;
  3. **IBRAHIM, SH.** dan **ABD. GAFUR, S.Sos., SH.** keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 (Perumahan Budi Daya Permai Blok C Nomor 12 Makassar, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Juni 2015 di bawah register perkara Nomor : 193/PID/2015/UB, surat kuasa tersebut diajukan di persidangan, dan setelah diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;
  4. **ABDUL HARIS, S.Sos., MM.** Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca ... dst;
- Telah mendengar ... dst;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Anak dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak **MUHAJRIN** alias **AJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**" dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar dan denda sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **01 JULI 2015** oleh kami **IG. EKO PURWANTO. SH., M.Hum.** Hakim Anak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mks tanggal 19 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **HENDRIK MAIRUHU, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI NURBAETI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Anak didampingi oleh **BAHARUDDIN** Ayah Kandung Anak, **SATRIA** Ibu Kandung Anak, **ABD. GAFUR, S.Sos., SH.** Penasehat Hukum Anak dan **ABDUL HARIS, S.Sos., MM.** Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

**HENDRIK MAIRUHU, S.Sos.**

**IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.**

## SURAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi  
Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Di Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muh. Arham Latif  
Nim : 10500113176  
Semester/Kelompok : Vi (Tujuh)/Ilmu Hukum D  
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- Acc
1. Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak
  2. Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak
  3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual


Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Mengetahui,  
Penasehat Akademik

  
(Dr. Muh. Sabir, M.Ag)

Makassar, 26 September 2016

Pemohon

  
(Muh. Arham Latif)

26/9/16.



Hahmar Yansuddin  
1982/207 2009011010





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor :            Tahun 2016

**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI  
TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Jumadi., SH., M.H
2. Abd Rahman., S.Ag., M.Pd.Ph.D

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Muh.Arham Latif

N I M : 10500113176

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak".

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 06 Desember 2016

Dekan,

*K* Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

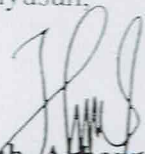
PENGESAHAN DRAFT SKRPSI

Nomor: 1744/IH/2017

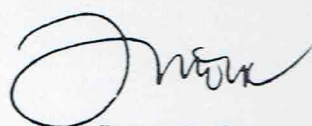
Judul skripsi: Analisis Putusan Majelis Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Kejahatan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor:  
146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)

Gowa' 20 -4 - 2017

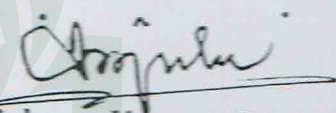
Penyusun,

  
Mdh. Alham Latif  
NIM. 10300113176

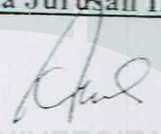
Pembimbing I

  
Dr. Jumadi, S.H., M.H.  
NIP.196302004 199403 1 003

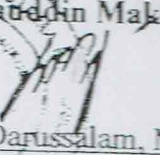
Pembimbing II

  
Abdul Rahman Kanang, S.Ag., M.Pd., Ph.D.  
NIP.19731231 200501 1 034

Diketahui Oleh  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
Istiqamah, S.H., M.H.  
NIP. 19680120 199503 2 001

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

  
Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.  
NIP. 19621016 1990031 003



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 917 Tahun 2017

TENTANG  
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)  
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 17 Juli 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata  
: 17 Juli 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

- Yth. 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;  
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar




**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**NOMOR : 917 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI				PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKD/UDIS	MKKP		
01	02	03	04	05	06	
1	Musyawwir Tahir 10500113133	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	Dr. Achmad Musyabid, M.Ag	Istiqamah, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, S.E Nurhayati Wahid	
2	Muh. Arham Latif 10500113176	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Dr. Darsul S Puyu, M.Ag	Ahkam jayadi, S.H., M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, S.E Nurhayati Wahid	
3	Miftahul Mutatahhirin 10500113133	Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A	Dr. Duding Abdullah, M.Ag	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, S.E Nurhayati Wahid	

Samata, 17 Juli 2017

  
 Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 19621016-1990031 003

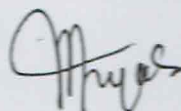
DAFTAR NILAI  
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF  
SEMESTER ..... { ..... } WISUDA PERIODE .....  
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : MUH. ARHAM LATIF  
NIM : 10500113176  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO. 196 / Pid. SUS. ANAK  
2015 / Pn.MKS)

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
3,7	3,8	4	11,5	3,83

Samata, 10 Agustus 2017

Kasubag.  
Akademik dan Kemahasiswaan



**MUJAHIDAH, S.E**

NIP : 19670309 199303 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)*  
*Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836*

Nomor : 1745-SI.1/PP.00.9/03/2017  
Lamp : 1 (satu) exemplar  
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 25 April 2017

Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Makassar**  
Di-  
Makassar

*Assalamu 'AlaikumWr.Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muh. Arham Latif  
N I M : 10500113176  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : BTN Hertasning Madani, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :



**“ Analisis Putusan Majelis Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Kejahatan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor :  
146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) ”**

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. Jumadi, S.H., M.H.**
2. **Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 25 April 2017 – 25 Mei 2017

Demikian harapan kami dan terimakasih.  
*Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.*

*Wassalam*  
An. Rektor  
  
  
**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.**  
**NIP. 19621016 199003 1 003**





## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) EMAIL : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

MAKASSAR 90111

Makassar, 05 Juni 2017

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 152 /HKM/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

#### BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUH. ARHAM LATIF

No.Pokok : 10500113176

Prog. Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Alamat : BTN Hertasning Madani, Gowa

Judul Skripsi : "ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI  
KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR No :  
146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tanggal 25 April 2017, dengan Nomor : 1745Sl.1/PP.00.9/03/2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA  
  
BASO RASYID, SH.MH  
NIP.196112101982031007

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 1023 Tahun 2017

**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Muh. Arham Latif  
N I M : 10500113176  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Analisis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual ( Studi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.  
Penguji I : Dr. Hamsir, M Hum  
Penguji II : Drs.H. Munir Salim, MH  
: 1. Mujahidah, SE  
: 2. Nurhayati Wahid

**Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 27 Juli 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



Nomor : SI.1/PP.00.9/2534/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 27 Juli 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag ( Ketua )
  2. Istiqamah, S.H., M.H. ( Sekretaris )
  3. Dr. Hamsir, M Hum ( Penguji I )
  4. Drs.H. Munir Salim, MH ( Penguji II )
  5. Dr. Jumadi, SH., M.H ( Pembimbing I )
  6. Dr. Abd.Rahman Kanang, M.Pd ( Pembimbing II )
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Muh. Arham Latif  
N I M : 10500113176  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2017  
Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

19621016 199003 1 003

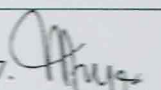
## DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Arham Latif

NIM : 10500113176



JURUSAN : Ilmu Hukum (IH)

JUDUL SKRIPSI : "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negara Makassar Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Istiqamah, S.H.,M.H	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Jumadi, S.H.,M.H	Pembimbing	3. 
4.	Dr. Abd. Rahman Kanang, M.Pd	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Hamsir, M.Hum	Penguji	5. 
6.	Dr. Munir Salim, M.H	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Muh. Arham Latif	Mahasiswa	9. 

Samata, 31 Juli 2017

Ketua Panitia

  
 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP 19621016 199003 1 003

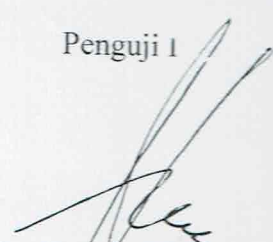
## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penulis Skripsi saudara **Muh. Arham Latif, Nim 10500113176**. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)**", Memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk diproses selanjutnya.

Gowa, 07 Agustus 2017

Penguji I

  
Dr. Hamsir, M. Hum

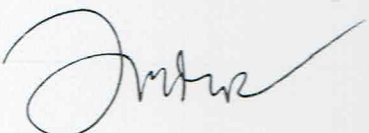
NIP. 1919610404 199303 1 005

Penguji II

  
Drs. H. Munir Salim, M.H

NIP. 19531231 197803 1006

Pembimbing I

  
Dr. Jumadi, S.H., M.H.

NIP. 196302004199403 1 003

Pembimbing II

  
Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19731231 200501 1 034



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 12.46 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Muh. Arham Latif  
N I M : 10500113176  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : " Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah /Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag  
Penguji I : Dr. Hamsir, M.Hum.  
Penguji II : Drs. H. Munir Salim, M.H  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 2969/SI.1/PP.00.9/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 15 Agustus 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag ( Ketua )
  2. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. ( Sekretaris )
  3. Dr. Hamsir, M.Hum ( Penguji I )
  4. Drs. H. Munir Salim, M.H ( Penguji II )
  5. Dr. Jumadi, M.H ( Pembimbing I )
  6. Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D ( Pembimbing II )
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi Atas Nama :

N a m a : Muh. Arham Latif  
N I M : 10500113176  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah /Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017  
Waktu : Pukul 11.00-12.00 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003



## DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Arham Latif

NIM : 10500113176

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Nomor.146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	Ketua	1.
2.	Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	Sekretaris	2.
3.	Dr. Jumadi, S.H., M.H.	Pembimbing	3.
4.	Dr. Abd. Rahman Kanang, M.Pd	Pembimbing	4.
5.	Dr. Hamsir, M.Hum.	Penguji	5.
6.	Drs. H. Munir Salim, M.H.	Penguji	6.
7.	Mujahidah, S.E.	Pelaksana	7.
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8.
9.	Muh. Arham Latif	Mahasiswa	9.

Samata, 21 Agustus 2017

Ketua Panitia



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP : 19621016 199003 1 003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Arham Latif, lahir di Bulukumba, pada tanggal 01 Januari 1996 dari pasangan suami istri yang bernama H. Abd Latif, S.Pd dan Hj. Nyoma, S.Pd. Anak kedua dari jumlah tiga bersaudara ini pertama kali melangkah kaki ke dunia pendidikan pada tahun 2000 di TK Nurul Hidayat Bacari, dan melanjutkan ke Sekolah Dasar Pada Tahun 2002 di MIN Model Bacari, Kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke tingkat Pendidikan Sekolah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2007 hingga 2010, kemudian melanjutkan ke tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada tahun 2010 hingga 2013. Setelah tamat, penulis memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu dan memilih jurusan Ilmu Hukum sebagai wadah untuk berproses. Penulis juga aktif dalam unit keorganisasian mahasiswa (UKM). Menekuni bidang seni bela diri penulis memilih UKM Tapak Suci, untuk mengembangkan kemampuan. Penulis juga masuk kedalam organisasi Intellectual Law Enforcement (ILE), ialah suatu *Study Club* yang bergerak dibidang Hukum.